

DAMPAK KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) BAGI MASYARAKAT DESA BARENG KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO

Alfan Syukran

12040674022 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: alfansyukran@gmail.com

Tauran, S.Sos., M.Soc., Sc.

0031047602 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: tauran_unesa@yahoo.com

Abstrak

BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan tersebut dilakukan karena terdapat sekitar 33.000 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal atau membutuhkan perhatian khusus. Dalam penelitian ini, terdapat potensi BUM Desa Bareng yang telah menjadi *pilot project* dan setiap tahunnya mengalokasikan 10% dari SHU untuk bantuan sosial. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak kegiatan BUM Desa di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan menggunakan *mix methods* melalui strategi campuran tidak berimbang. Pendekatan kuantitatif mengambil sampel 53 anggota BUM Desa Bareng. Subjek penelitian pendekatan kualitatif terdiri dari Kepala BUM Desa Bareng, Bendahara BUM Desa Bareng, Bagian Sektor *rill*, dan anggota BUM Desa Bareng. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara pengolahan data, pengorganisasian data dan penemuan hasil. Sedangkan analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUM Desa Bareng sangat berdampak pada penguatan kapasitas kelembagaan BUM Desa, sangat berdampak pada peningkatan kemampuan pengelolaan usaha BUM Desa yang berbasis pada pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar, sangat berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa, sangat berdampak pada peningkatan kreativitas, inovasi dan variasi usaha BUM Desa, berdampak pada pengembangan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, dan sangat berdampak dalam menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga. Tetapi dalam data kualitatif membuktikan bahwa program usaha bank sampah tidak berdampak dalam memenuhi kebutuhan anggota, memberikan penyadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan meningkatkan kebersihan lingkungan. Kegiatan BUM Desa Bareng juga sangat berdampak pada jumlah lapangan pekerjaan menjadi terbuka. Hal tersebut didukung dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa adanya BUM Desa Bareng dapat membuka lapangan kerja, meskipun belum sepenuhnya.

Kata Kunci: Dampak, BUM Desa, program usaha

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) is a business entity that all or most of the capital is owned by the village to manage the assets, services, and other efforts for the welfare of rural communities. The policy was because there are about 33.000 villages included in the category of underdeveloped villages or requiring special attention. In this research can be potential BUM Desa Bareng that has become a pilot project and every year to allocate 10 % of the rest of business to social assistance. The purpose of this research to analyze impact of activities BUM Desa in Bareng Village, Sugihwaras District, Bojonegoro Regency. The research is evaluative research using mix methods through a strategy of mixed ones not equal. The quantitative approach by taking sample 53 a member of BUM Desa Bareng. The subject of study a qualitative approach consisting of a head BUM Desa Bareng, treasurer BUM Desa Bareng, part *rill* sector, and members of BUM Desa Bareng. Analysis quantitative data done by means of data processing, organizing the data and the discovery of the results. While data analysis using qualitative analysis technique miles and huberman, namely data collection, reduction of the data, presentation of data and the withdrawal of the conclusions. The result showed that the BUM Desa Bareng have a major influence on strengthening the institutional capacity BUM Desa, very impact on improving the business management capabilities BUM Desa based on the potential of the village in accordance with community needs and market opportunities, very impact on to increase the income of the village and village revenue, very impact on improving the creativity, innovation and variation BUM Desa business, impact on development plan business cooperation between village and or by third parties, and very resulted in creating opportunities and networks markets that supports the needs of public services residents. But in the data qualitative prove that the program the business of a bank garbage has not had an impact in fulfilling the needs of the membership, give awareness about the importance of waste management, and improve hygiene environment. Activities BUM Desa Bareng also have a major influence on the number of job opportunities become open. This is supported by qualitative data shows that the existence of boom village together can employment, although it is not fully.

Keyword: Impact, BUM Desa, Business Program

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat sesuai dengan karakteristik daerahnya. Oleh karena itu, konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan, yaitu Desa (Goma, 2015: 1). Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat, dan lainnya telah menjadi institusi sosial yang sangat penting (Widjaja, 2004: 4). Berkaitan dengan desa, pemerintah telah mengesahkan peraturan yang mengatur khusus tentang pemerintahan desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa).

Dalam Buku Induk Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten atau Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia Tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri telah mencatat terdapat 74.754 wilayah administrasi desa dan 8.390 wilayah administrasi kelurahan (Sumber: www.kemendagri.go.id). Sekitar 33.000 desa merupakan desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal atau membutuhkan perhatian khusus (Sumber: www.setkab.go.id). Pemerintah Pusat telah berupaya meng atasi permasalahan tersebut melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan menyalurkan 100 persen dana desa tahap pertama sebesar Rp 8,28 triliun kepada pemerintah kabupaten penerima pada tahun 2015 (Sumber: www.setkab.go.id).

Salah satu kegiatan yang ditujukan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Desa yang tertuang dalam UU Desa yaitu kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Menurut pasal 1, ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun, subtansi mengenai BUM Desa bukanlah sesuatu yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, BUM Desa sesungguhnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Ridlwani, 2014: 426).

Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan menanggulangi kemiskinan telah mengembangkan kegiatan BUM Desa. Hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa BUM Desa telah terbentuk dan tersebar di 38 kabupaten atau kota (Bapemas Provinsi Jawa Timur, 2015: 2). Kegiatan tersebut dilakukan karena angka kemiskinan di wilayah perdesaan lebih banyak dibandingkan wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Timur. Menurut Badan Statistik Jawa Timur, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 mencapai 4.748.420 jiwa dimana sekitar 1.531.890 jiwa atau 32,26% berada di perkotaan. Sedangkan sekitar 3.216.530 jiwa atau 67,74% berada di perdesaan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin di perdesaan lebih banyak daripada jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2014). Angka tersebut juga menggambarkan bahwa masyarakat desa rentan mengalami kemiskinan.

Salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mengembangkan BUM Desa adalah Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mendirikan BUM Desa sejak tahun 2006, sudah berdiri sebanyak 419 BUM Desa. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2014, dari 419 BUM Desa tersebut, BPMPD Bojonegoro memilih 21 BUM Desa untuk dijadikan *pilot project* (proyek percontohan) dan mendapatkan pengarah dan pendampingan kelembagaan BUM Desa (Sumber: BPMPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2014).

BUM Desa Bareng, Kecamatan Sugihwaras merupakan salah satu BUM Desa yang menjadi *pilot project* di Kabupaten Bojonegoro. BUM Desa ini berdiri sejak tahun 2004 yang berbentuk Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) dan bertransformasi menjadi BUM Desa pada tahun 2008. BUM Desa Bareng juga telah mengatur BUM Desa tersebut melalui Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bareng.

Usaha yang dikelola BUM Desa Bareng yaitu Program Usaha Simpan Pinjam Permodalan yang berdiri sejak tahun 2008 dan Program Usaha Kredit Barang Elektronik tahun 2012. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta menanamkan rasa ikut memiliki, BUM Desa Bareng juga membuat Program Usaha Bank Sampah yang bertujuan untuk membiasakan masyarakat hidup bersih, gemar menabung dan juga menggali dana sukarela dari

masyarakat pada tahun 2012. Sampai saat ini, jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) yang aktif terdapat 38 kelompok atau sekitar 266 orang (Profil BUM Desa Bareng, 2015: 1).

Berdasarkan wawancara awal (*grand tour question*), keberadaan BUM Desa Bareng nampaknya memiliki dampak bagi masyarakat Desa Bareng. Sebelum adanya BUM Desa Bareng, masyarakat Desa Bareng merasa kesulitan mendapatkan permodalan. Sehingga masyarakat meminjam ke bank swasta dengan bunga yang cukup tinggi. Setelah adanya BUM Desa, masyarakat dipermudah dalam mendapatkan akses permodalan yang digunakan membuka usaha yang meliputi usaha untuk pertanian, perdagangan, pertokoan dan lainnya.

Berbagai penghargaan telah diterima oleh BUM Desa Bareng, diantaranya menjadi BUM Desa terbaik di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2014. Selain itu, menjadi BUM Desa terbaik ke enam dalam evaluasi kinerja unit pengelola keuangan program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 dan menjadi BUM Desa terbaik keempat dalam evaluasi BUM Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Menurut data yang disampaikan dalam evaluasi BUM Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2015, dari modal awal sebesar Rp 63.000.000, sejak berdiri dari tahun 2004 hingga per 31 Desember 2014 mencapai Rp 446.309.950 (Profil BUM Desa Bareng, 2015: 4). Rasio perkembangan asset dari usaha yang diimplementasikan mencapai 608%. Adapun Sisa Hasil Usaha (SHU) tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan.

Dampak sosial keberadaan BUM Desa Bareng nampaknya juga dirasakan oleh masyarakat Desa Bareng dimana setiap tahunnya BUM Desa Bareng mengalokasikan 10% dari SHU untuk bantuan sosial. Hal tersebut sesuai dengan pasal 38, ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Fakta tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibawati (2015: 202) yang menunjukkan bahwa BUM Desa telah berhasil menjadi lembaga ekonomi pedesaan yang mendukung terwujudnya otonomi desa, mengangkat potensi desa dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Temuan tersebut juga didukung oleh Rahmawati (2014: 126) yang juga menunjukkan bahwa keberadaan BUM

Desa bermanfaat baik secara sosial maupun ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan BUM Desa Bareng dalam memberikan beberapa dampak positif bagi masyarakat menarik untuk dikaji. Sehubungan dengan adanya fenomena tersebut dan hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengkaji dampak kegiatan BUM Desa di Desa Bareng, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro guna mengetahui dan menganalisis sejauh mana dampak kegiatan BUM Desa Bareng bagi masyarakat Desa Bareng yang diukur sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pedoman Umum BUM Desa Kabupaten Bojonegoro tahun 2015. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Dampak Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro".

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana dampak kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?"

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa implikasi teoritis terkait konsep-konsep ilmu administrasi negara khususnya dalam studi dampak kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BUM Desa Bareng

Melalui penelitian ini, diharapkan bisa menjadi masukan untuk pengurus BUM Desa Bareng yang dalam hal ini adalah pelaksana kegiatan BUM Desa di Desa Bareng. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan untuk perbaikan kegiatan BUM Desa di desa tersebut.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan baru bagi mahasiswa mengenai kegiatan BUM Desa.

c. Bagi Universitas Negeri Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut dapat digunakan

sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya yang serupa.

KAJIAN PUSTAKA

Pengukuran dampak dalam penelitian ini menggunakan indikator tujuan BUM Desa dalam Pedoman Umum BUM Desa Kabupaten Bojonegoro tahun 2015, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BUM Desa guna meningkatkan perekonomian desa. Indikator ini dapat diukur dengan melihat kemampuan anggota BUM Desa dalam merencanakan pembangunan perekonomian desa dan terjadinya peningkatan kapasitas anggota BUM Desa dalam mengelola pembangunan perekonomian desa.
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha BUM Desa yang berbasis pada pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar. Indikator ini dapat diukur dengan melihat kemampuan pengelolaan usaha BUM Desa yang berbasis pada pengelolaan potensi desa, kemampuan pengelolaan usaha BUM Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kemampuan pengelolaan usaha BUM Desa sesuai dengan peluang pasar.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Indikator ini dapat diukur melalui kegiatan BUM Desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan telah meningkatkan pendapatan asli desa.
4. Meningkatkan kreativitas, inovasi dan variasi usaha BUM Desa. Indikator ini diukur dengan adanya peningkatan kreativitas berwirausaha masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, program dalam kegiatan BUM Desa berbeda dengan usaha yang telah dilakukan sebelumnya, dan BUM Desa telah mempunyai berbagai bentuk program usaha yang dijalankan
5. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga. Indikator ini diukur melalui kemampuan BUM Desa dalam mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, yaitu terjadi peningkatan jumlah kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga.
6. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga. Indikator ini diukur melalui adanya jaringan antar pelaku usaha yang mendukung berkembangnya BUM Desa.
7. Membuka lapangan kerja. Adanya BUM Desa, jumlah lapangan pekerjaan menjadi terbuka atau bertambah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mix methods*), yaitu dengan menerapkan dua pendekatan sekaligus (kuantitatif dan kualitatif). Strategi metode campuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi *embedded* konkrue (campuran tidak berimbang). Strategi *embedded* konkrue adalah metode penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan mencampur kedua metode tersebut secara tidak berimbang dimana dalam penelitian ini bobot kuantitatif lebih tinggi dan kualitatif berfungsi untuk membuktikan, memperdalam, dan memperluas data. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Pendekatan kuantitatif mengambil sampel 53 anggota BUM Desa Bareng dengan teknik *simple random sampling*. Subjek penelitian dalam pendekatan kualitatif dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Kepala BUM Desa Bareng, Bendahara BUM Desa Bareng, Bagian Sektor riil, dan anggota BUM Desa Bareng. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara pengolahan data, pengorganisasian data dan penemuan hasil. Sedangkan analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

BUM Desa Bareng merupakan salah satu BUM Desa di Kabupaten Bojonegoro yang berdiri atas dasar program pemerintah dalam upaya membantu mengetaskan kemiskinan masyarakat yang ada di Desa Bareng, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. Sebagaimana tercantum dalam visi BUM Desa Bareng, yaitu kreatif dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keterjaminan sosial. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lemieux (Wahab, 2014: 15) yang menyatakan bahwa produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut dilakukan dengan prinsip dasar BUM Desa, salah satunya yaitu keterpaduan kegiatan BUM Desa yang dikembangkan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan dengan mengoptimalkan kerjasama antar masyarakat, pemerintah, pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta pelaku pembangunan lainnya secara sinergis.

BUM Desa Bareng berdiri dari tahun 2008 merupakan transformasi dari UPK yang telah berdiri sejak tahun 2004. BUM Desa Bareng mempunyai tiga program usaha, yaitu program usaha simpan pinjam permodalan, program usaha kredit barang elektronik, dan program usaha bank sampah. Kegiatan BUM Desa Bareng tidak lepas oleh peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program usaha BUM Desa, sebagaimana

pendapat Anderson (Islamy dalam Widodo, 2013:14) menyatakan bahwa kebijakan publik yang bersifat positif selalu berdasarkan peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa atau otoritatif. Pelaksanaan kegiatan BUM Desa Bareng merujuk pada peraturan yang berlaku, yaitu Pedoman Umum BUM Desa Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 dan Peraturan Desa, Nomor 8 tahun 2008, Desa Bareng tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bareng. Tetapi, dalam program kredit barang elektronik dan program bank sampah belum dicantumkan atau diatur dalam Peraturan Desa, Nomor 8 tahun 2008 karena belum direvisi, sehingga tidak ada pedoman yang jelas dalam mengatur kedua program tersebut.

Dalam perjalanan BUM Desa Bareng, terdapat fenomena positif pelaksanaan BUM Desa Bareng, yaitu BUM Desa Bareng menjadi pilot project BUM Desa di Kabupaten Bojonegoro, berbagai penghargaan telah dicapai oleh BUM Desa Bareng, dan setiap tahunnya BUM Desa Bareng mengalokasikan 10% dari SHU untuk bantuan sosial. Berkaitan dengan itu, perlu untuk dilakukan riset evaluasi dampak yang dimaksudkan untuk menilai sampai sejauh mana suatu kebijakan menyebabkan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki (*intended impacts*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Subarsono (2007:120) yang menyatakan bahwa salah satu tujuan evaluasi kebijakan adalah untuk mengukur dampak suatu kebijakan. Riset evaluasi dampak dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas kegiatan BUM Desa dalam pencapaian tujuan berdasarkan tujuan BUM Desa dalam Pedoman Umum BUM Desa Kabupaten Bojonegoro tahun 2015.

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan riset evaluasi dampak kegiatan BUM Desa Bareng adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan BUM Desa Bareng. Setelah diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan BUM Desa tersebut, maka tujuan berikutnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan berupa keputusan tentang masa depan dari kebijakan BUM Desa. Alternatif rekomendasi kebijakan sebagaimana diungkapkan oleh Weiss, antara lain: kebijakan perlu diteruskan atau diberhentikan, kebijakan perlu diteruskan tetapi perlu diperbaiki baik prosedur atau penerapannya, perlunya menambah atau mengembangkan strategi atau teknik program-program khusus, perlunya menerapkan kebijakan program serupa ditempat lain, perlunya mengalokasikan sumber daya langka diantara program yang saling berkompetitif, dan perlunya menolak atau menerima teori atau pendekatan kebijakan program.

Pendekatan evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan evaluasi formal. Evaluasi

formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan dalam penelitian ini dimana menggunakan metode deskriptif untuk menghasikan informasi yang valid, cepat dan kredibel mengenai hasil-hasil kebijakan. Instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tujuan BUM Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 yang telah diumumkan secara formal oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode evaluasi Single program after-only, yaitu informasi diperoleh berdasarkan keadaan kelompok sasaran sesudah kegiatan BUM Desa yang dijalankan.

Pemaparan dari hasil penelitian mengenai dampak kegiatan BUM Desa Bareng bagi masyarakat Desa Bareng menyebutkan bahwa:

- 1) Indikator menguatkan kapasitas kelembagaan BUM Desa guna meningkatkan perekonomian desa. Terdapat enam item pertanyaan dimana diketahui hasil persentase sebesar 91,57% yang nilai pernyataannya sangat berdampak. Hasil tersebut juga didukung dengan hasil data kualitatif yang menyatakan bahwa BUM Desa Bareng selalu melibatkan aspirasi anggota melalui musyawarah memilih pengawas BUM Desa, musyawarah mempertanggung jawabkan kegiatan BUM Desa, memilih pengurus BUM Desa, memberhentikan pengurus BUM Desa, dan melibatkan anggota dalam penyusunan rencana strategis pengembangan BUM Desa. Penguatan kapasitas kelembagaan BUM Desa Bareng juga dilakukan melalui berbagai pelatihan. Jenis pelatihan kapasitas yang dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan, seperti pelatihan bank sampah di Provinsi Yogyakarta, pelatihan administrasi berupa pembukuan dan pelatihan koperasi di Kota Surabaya, dan beberapa pelatihan oleh BPMPD di Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Indikator mengenai peningkatan kemampuan pengelolaan usaha BUM Desa yang berbasis pada pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar memiliki persentase 89,27% dengan nilai pernyataan sangat berdampak. Hasil tersebut juga dikuatkan oleh data kualitatif yang menyatakan bahwa setiap program usaha yang dijalankan BUM Desa Bareng melihat potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Kecuali program usaha bank sampah yang merupakan gagasan dari pengurus BUM Desa dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BUM Desa Bareng dalam mendirikan usaha juga telah melihat peluang pasar.
- 3) Indikator mengenai peningkatan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa memiliki persentase 93,77% dengan nilai pernyataan sangat berdampak. Hasil tersebut juga didukung dengan

hasil data kualitatif yang menyatakan bahwa modal dari hasil meminjam dapat digunakan untuk membeli sesuatu yang produktif, seperti pembelian kambing dan pembelian pupuk. BUM Desa juga memberikan bantuan berupa kambing kepada masyarakat Desa Bareng yang membutuhkan. Hasil PADesra dari SHU dalam implementasinya juga langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap dusun yang diundi secara bergilir setiap tahunnya untuk pembangunan jalan antar dusun, lantai taman kanak-kanak (TK), dan penerangan listrik di mushola atau masjid secara bergilir.

- 4) Indikator meningkatkan kreativitas, inovasi dan variasi usaha BUM Desa dengan persentase 90,66% dengan nilai pernyataan sangat berdampak. Hasil tersebut juga didukung dengan hasil data kualitatif yang menyatakan bahwa adanya BUM Desa sangat berdampak pada peningkatan kreativitas berwirausaha masyarakat desa dimana banyaknya anggota BUM Desa Bareng yang membuka toko dengan produk kebutuhan pokok, berjualan motor, dan beternak kambing. BUM Desa juga mengadakan lomba setiap RT dalam membuat produk unggulan yang akan dipasarkan dimana antusiasme masyarakat sangat tinggi. Program simpan pinjam permodalan, program usaha kredit barang elektronik, dan program usaha bank sampah merupakan program hasil dari inovasi. Hal tersebut akan mempengaruhi variasi usaha BUM Desa Bareng berupa program simpan pinjam permodalan, program kredit barang elektronik, dan program bank sampah.
- 5) Indikator mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga memiliki persentase 77,54% dimana berada dalam nilai pernyataan berdampak. Hasil tersebut juga didukung oleh data kualitatif yang menyatakan bahwa BUM Desa Bareng melakukan kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bojonegoro dalam program usaha kredit permodalan. Selain itu, terjadi peningkatan kerjasama BUM Desa Bareng dengan pihak ketiga, yaitu berbagai toko di Kecamatan Sugihwaras maupun di Kecamatan Bojonegoro. Terkait kerjasama antar BUM Desa belum dilakukan oleh BUM Desa Bareng karena BUM Desa disekitar BUM Desa tidak aktif (*non active*).
- 6) Indikator menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga memiliki persentase 94,33% dengan nilai pernyataan sangat setuju. Hasil tersebut juga didukung dengan hasil data kualitatif yang menyatakan bahwa BUM Desa dapat memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat dalam memberikan bantuan permodalan,

memenuhi pesanan dari setiap anggota maupun anggota masyarakat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menampung sampah atau barang bekas. Tetapi dalam item pertanyaan program usaha bank sampah telah memenuhi kebutuhan anggota, bank sampah telah memberikan penyadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah, keberadaan bank sampah meningkatkan kebersihan lingkungan dalam data kuantitatif tidak sesuai dengan data kualitatif yang diperoleh.

- 7) Indikator membuka lapangan kerja dapat dilihat dengan adanya BUM Desa jumlah lapangan pekerjaan menjadi terbuka atau bertambah. Hasil perhitungan didapatkan item pertanyaan jumlah lapangan pekerjaan menjadi bertambah setelah adanya BUM Desa dengan sebesar 89,05% dimana mendapatkan nilai pernyataan sangat berdampak. Hal tersebut didukung dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa adanya BUM Desa Bareng dapat membuka lapangan kerja meskipun belum sepenuhnya. Beberapa usaha yang dilakukan oleh anggota BUM Desa Bareng seperti membuka toko, servis motor, ternak kambing, dan lainnya. Hasil observasi menunjukkan dua sampel bahwa terdapat anggota BUM Desa Bareng yang mempunyai usaha berupa bengkel motor. Modal untuk membuka bengkel tersebut berasal dari modal yang diberikan oleh BUM Desa. Selain bengkel motor, terdapat pula warga yang ternak kambing etawa yang dapat diperas susunya untuk dikonsumsi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator menguatkan kapasitas kelembagaan BUM Desa guna meningkatkan perekonomian desa dapat diketahui persentase sebesar 91,57% dengan mendapatkan nilai pernyataan sangat berdampak dan hasil tersebut juga didukung dengan hasil data kualitatif. Indikator mengenai peningkatan kemampuan pengelolaan usaha BUM Desa yang berbasis pada pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar memiliki persentase 89,27% dengan nilai pernyataan sangat berdampak dan hasil tersebut juga dikuatkan oleh data kualitatif. Indikator mengenai peningkatan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa memiliki persentase 93,77% dengan nilai pernyataan sangat berdampak dan hasil tersebut juga didukung dengan hasil data kualitatif. Indikator meningkatkan kreativitas, inovasi dan variasi usaha BUM Desa dengan persentase 90,66% dengan nilai pernyataan sangat berdampak dan hasil tersebut juga didukung dengan hasil data kualitatif.

Indikator mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga memiliki persentase 77,54% dimana berada dalam nilai pernyataan berdampak dan hasil tersebut juga didukung oleh data kualitatif. Indikator menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga memiliki persentase 94,33% dengan nilai pernyataan sangat setuju dan hasil tersebut juga didukung dengan hasil data kualitatif. Tetapi dalam data kualitatif membuktikan bahwa program usaha bank sampah telah memenuhi kebutuhan anggota, bank sampah telah memberikan penyadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan keberadaan bank sampah meningkatkan kebersihan lingkungan belum berdampak. Indikator membuka lapangan kerja dapat dilihat dengan adanya BUM Desa jumlah lapangan pekerjaan menjadi terbuka atau bertambah. Hasil perhitungan didapatkan item pertanyaan jumlah lapangan pekerjaan menjadi bertambah setelah adanya BUM Desa dengan sebesar 89,05% dimana mendapatkan nilai pernyataan sangat berdampak. Hal tersebut didukung dengan data kualitatif

Saran

Sesuai kesimpulan di atas, maka saran yang bisa diberikan sebagai hasil identifikasi kekurangan pada kegiatan BUM Desa Bareng, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam menyempurnakan pelaksanaan BUM Desa, antara lain:

1. Perlu pembaharuan Peraturan Desa Bareng Nomor 4 Tahun 2008 yang mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bareng dimana dalam pedoman tersebut perlu direvisi terkait petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) peraturan program usaha simpan pinjam permodalan dan ditambahkan terkait juklak dan juknis program usaha kredit barang elektronik dan program usaha bank sampah.
2. Kegiatan kompetisi produk unggulan perlu diteruskan yaitu dengan membuat program usaha didalam BUM Desa Bareng yang berfungsi untuk memproduksi produk unggulan tersebut secara massal, sehingga masyarakat mempunyai kegiatan yang bermanfaat, menghasilkan laba dan produktif.
3. Perlu adanya inovasi program usaha bank sampah untuk menarik minat masyarakat BUM Desa Bareng, seperti pembuatan kerajinan dari sampah atau barang bekas dan sosialisasi dalam program bank sampah kepada anggota dan masyarakat Desa Bareng tentang pentingnya keberadaan bank sampah dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan kebersihan lingkungan.

4. Perlu adanya kerjasama BUM Desa Bareng dengan BUM Desa lain baik di dalam maupun diluar Kecamatan Sugihwaras. Hal ini dilakukan untuk memperkuat jaringan perekonomian antar desa, sehingga banyak desa yang akan merasakan dampak BUM Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurokhman. 2014. *Pengembangan Potensi Desa*. (<http://static.banyumaskab.go.id/website/file/221120140947001417229220.pdf>, diakses 11 November 2015).
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta: Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. *Pedoman Umum Pengembangan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015*. BPMPD Kabupaten Bojonegoro. Bojenegoro.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi*. (www.bps.go.id/linktabelstatis/view/id/-1488, diakses 20 Juli 2015)
- Badan Usaha Milik Desa. 2015. *Buku Profil BUMDes UPK Sejahtera 2015*. BUMDes Desa Bareng. Kabupaten Bojonegoro.
- Chen, Weifeng , dkk. 2013. Organisational change and development of reformed Chinese township and village enterprises. *Journal of Organizational Change Management* 26 (2): 353-369. www.emeraldinsight.com/0953-4814.htm.
- Coristya dkk., 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, hal. 1068-1076 (<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/189/169>, diakses 11 November 2015).
- Creswell. 2013. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Cetakan ke 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-Undang-Undang-Nomor-6-Tahun-2014-tentang-

- Desa-1421724948.pdf, diakses 30 Oktober 2015).
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Goma, Subhan. 2015. *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*, (Online), (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/10055/9641>, diakses 26 Desember 2015).
- Hamidi, Ridwan dan Zulkarnaini. 2013. Kapasitas Lembaga Usaha Ekonomi Desa. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 11, Nomor 2: hal. 71-143. (<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/1925>, diakses 11 November 2015).
- Kementerian Dalam Negeri 2015. *Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.56-2015)*. (www.kemendagri.go.id/pages/data-wilayah, diakses 30 Oktober 2015)
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. 2015. *Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Organisasi Dan Tata Kerja Transmigrasi*. (<http://www.kemendes.go.id/hukum/5/peraturan-menteri>, diakses 30 Oktober 2015).
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produk hukum/PP%20Nomor%2043%20Tahun%202014.pdf, diakses 30 Oktober 2015).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*. (www.cch.kpk.go.id/documents/10180/15049/Buku+Laporan+Kajian+Sistem+Pengelolaan+Keuangan+Desa.pdf/292dcf24-b997-44a6-b51e-9c9db50089be, diakses 30 Oktober 2015)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa*. (www.acch.kpk.go.id/documents/10180/15049/Buku+Laporan+Kajian+Sistem+Pengelolaan+Keuangan+Desa.pdf/292dcf24-b997-44a6-b51e9c9db50089be, diakses 30 Oktober 2015).
- Lusiyana Danny, 2013. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Wirakarya di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Skripsi tidak diterbitkan. Bandar Lampung : Universitas Lampung (<http://digilib.unila.ac.id/928/>, diakses 11 November 2015).
- Munifa. 2013. *Analisis Tingkat Pendapatan Masyarakat Sekitar PTPN XI Pabrik Gula Padjarakan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. (<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/5691/Munifa%20-%20090810101090.pdf?sequence=1>, diakses 30 Oktober 2015).
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- O. Tada, dkk. 2012. Monetary value, current roles, marketing options, and farmer concerns of communal Nguni cattle in the Eastern Cape Province, South Africa. *African Journal of Business Management* 6 (45): 11304-11311. (www.academicjournals.org/AJBM).
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung (2008), *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*, edisi keempat, Buku Seri Teori Ekonomi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahmawati. 2014. Peranan Modal Sosial dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Studi di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari dan Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul). Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. (www.etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=77917&obyek_id=4, diakses 30 Oktober 2015).
- Rasul, Abdul. 2015. Penguatan Kemandirian Lokal Dengan Membangun Partisipasi Lembaga Masyarakat Di Desa. *AkMen Jurnal Ilmiah*, Vol. 12. No. 1: 83-89. (<http://ejurnal.stienobelindonesia.ac.id/index.php/akmen1212015/article/view/96>, diakses 11 November 2015).
- Ridlwani, Zulkarnain. 2013. Payung Hukum Pembentukan BUMDes. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 7 No. 3: hal. 355-370.
- Ridlwani, Zulkarnain. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 (3): hal. 424-440.
- Riduwan dan Sunarto. 2013. *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi Komunikasi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- Rorimpandey dkk. 2014. Analisis Pengeruh Pendapatan Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Daging dan Telur di Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal ZooteK*. Vol. 34 (1): hal. 37-47. (www.ejournal.unsrat.ac.id/index.php/zooteK/article/download/9468/9056, diakses 11 November 2015).
- Saerozi. 2011. *Pemahaman Agama dan Perilaku Ekonomi Sebagai Faktor Tingkat Kesejahteraan Nelayan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*. Arikel Penelitian. (www.eprints.walisongo.ac.id/3989/1/saerozikesjahteraan_nelayan_2012.pdf, diakses 10 November 2015).
- Samadi, dkk 2015. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BUMDES Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*. Artikel Penelitian. (www.e-journal.upp.ac.id/index.php/fekon/article/view/378/384, diakses 30 Oktober 2015).
- Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. 2015. *Pemerintah Prioritaskan Dana Desa Untuk BUMDes*. (www.setkab.go.id/pemerintah-prioritaskan-dana-desa-untuk-bumdes/, diakses 28 Oktober 2015).
- Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. 2015. *Sudah Salurkan Rp 8,28 Triliun, Marwan Minta Pemerintah Kabupaten Segera Salurkan Dana Desa*. (www.setkab.go.id/sudah-salurkan-rp-828-triliun-marwan-minta-pemerintah-kabupaten-segera-salurkan-dana-desa, diakses 28 Oktober 2015).
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 18. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Cetakan ke 6. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto dan Sastowiyono. 2014. *Penyusunan Kelayakan Usaha dan Pengembangan Usaha Bum Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Sujarno. 2008. *Analisis yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Langkat*. Tesis tidak diterbitkan. Medan: Universitas Sumatera Utara (www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7165/1/09E00282.pdf, diakses 11 November 2015).
- Sukasmanto. 2014. *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta : PT. Rai Grafindo Persada.
- Suroto. 2000. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wibawati. 2015. *Kapasitas Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Potensi Desa (Studi Pada Bumdes Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Desa)*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. (www.etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=83649&obyek_id=4, diakses 30 Oktober 2015).
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Cetakan ke Sembilan. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2007. *kebijakan publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Angkasa Bandung: Bandung.